

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 414 – 424

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah

SULFIANTY

Email : anthycahaya@yahoo.co.id

STIE Ichsan Pohuwato

ABSTRAK

Peranan auditor internal sangat diperlukan untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Inspektorat Kabupaten Pohuwato. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau sensus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial maupun secara simultan.

Kata kunci : *Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, dan Kualita Audit.*

ABSTRACT

The role of internal auditors is needed to encourage the realization of good and clean governance. This study aims to determine the effect of competence, independence and accountability on inspectorate audit quality in regional financial supervision. Population in this study are all civil servants Inspectorate of Pohuwat Regency. The sample selection method in this study is the saturated or census sampling method. The results of this study indicate that independence and accountability have an influence on audit quality both partially and simultaneously.

Keywords: *Competence, Independence, Accountability, and Audit Quality.*

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi merupakan tujuan penting dari sebuah reformasi akuntabilitas dan administrasi sektor publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah yang dilakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah masih ada pemerintahannya yang belum siap dengan sistem pemerintahan yang baru untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan *good governance*. Menurut Mardiasmo terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya *good governance* yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan atau audit.

Selain belum siapnya menerapkan sistem pemerintahan yang baru terdapat pula kelemahan dalam pengendalian internal yang menyebabkan terjadinya ketidakefisienan dan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya berdampak pada pemborosan anggaran dan keuangan daerah. Selain itu penyalahgunaan wewenang masih merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu lembaga

pemerintahan yang salah satunya yaitu tindakan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Hal ini dibuktikan masih banyaknya ditemukan kasus kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat ini seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pelanggaran dan masih banyak lagi kasus pidana lainnya yang membuat menurunnya kepercayaan masyarakat kepada kinerja aparat birokrasi.

Pelaksanaan

pemeriksaan/pengawasan dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Inspektorat. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Inspektorat sebagai perangkat daerah di bawah Gubernur yang mempunyai mandat untuk melakukan pengawasan fungsional atas kinerja organisasi Pemerintah Daerah. Seluruh proses dari kegiatan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi adalah tugas dari pengawas internal. Menurut Falah (2005:2) Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : apakah kompetensi, independensi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah pokok yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat tiga proses yaitu perencanaan (termasuk didalamnya aktivitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktivitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna

anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan.

Berdasarkan Sistem informasi akuntansi dalam sistem perencanaan dan pengendalian sektor publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Dalam fungsi pengukuran, akuntansi melakukan proses pengumpulan, pencatatan realisasi pendapatan dan belanja serta transaksi-transaksi yang terjadi diluar pendapatan dan belanja, serta aktivitas pelaporan. Selanjutnya akan dapat digunakan sebagai pengukur kinerja ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang dirancang secara baik, akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula (Jones, dalam Afiah, 2009:19).

Sejalan dengan era reformasi, akuntansi sektor publik mulai mendapat perhatian yang serius. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Dalam pemerintahan sendiri sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

penilaian kelayakan praktek manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Organisasi sektor publik termasuk pemerintah saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan.

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga/aparat pengawasan yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi. Pengawasan fungsional tersebut dilakukan oleh

lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah maupun pengawas intern pemerintah. Pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, asistensi dan konsultasi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar Audit APIP. Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diaudit.

3. Kualitas Audit

Kualitas audit menurut De Angelo yang dikutip Alim dkk. (2007:4) adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO), mendefinisikan kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yaitu bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Widagdo *et al* dalam Alim (2007:5) mengembangkan 12 atribut

kualitas audit yang meliputi: 1) pengalaman tim audit dan KAP dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan klien, 2) keahlian/pemahaman terhadap industri klien, 3) responsif atas kebutuhan klien, 4) kompetensi anggota-anggota tim audit terhadap prinsip-prinsip akuntansi dan norma-norma pemeriksaan, 5) sikap independensi dalam segala hal dari individu-individu tim audit dan KAP, 6) anggota tim audit sebagai suatu kelompok yang bersifat hati-hati, 7) KAP memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas, 8) keterlibatan pimpinan KAP dalam pelaksanaan audit, 9) pelaksanaan audit lapangan, 10) keterlibatan komite audit sebelum, pada saat, dan sesudah audit, 11) standar-standar etika yang tinggi dari anggota anggota tim audit, dan 12) menjaga sikap skeptis dari anggota-anggota tim audit.

Kompetensi

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary dalam Efendy (2010:23) mendefinisikan kompetensi sebagai ketrampilan dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Sedangkan Trotter dalam Sri Lastanti (2005:88) mendefinisikan bahwa seorang yang berkompoten adalah orang yang

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

dengan keterampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan.

Bedard dikutip oleh Sri lastanti (2005:88) mengartikan keahlian atau kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Dalam standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah.

Independensi

Independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Pusdiklatwas BPKP (2005) menyatakan bahwa auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Sedangkan menurut Arens, *et al.*, di kutip oleh Efendy (2010:34) menjelaskan bahwa nilai audit sangat tergantung pada persepsi publik terhadap independensi auditor, independensi dalam pengauditan sebagai penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit.

Independensi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemeriksa. Independensi sangat menentukan kredibilitas pemeriksa dan laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa tersebut. Pemeriksa memang harus memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan untuk memeriksa, tetapi apabila pemeriksa tersebut tidak independen,

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

maka seberapa hebatnya laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan, pada akhirnya pengguna laporan tetap akan meragukan kredibilitas laporan tersebut (SPKN, 2008:18).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungannya. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional setiap auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tetclock (1984) dalam Karnia (2015) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas hasil kerja auditor membuktikan bahwa akuntabilitas dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor jika pengetahuan audit yang dimiliki tinggi.

Menurut Mardisar dan Sari (2007:7), seseorang dengan akuntabilitas tinggi memiliki keyakinan yang lebih tinggi bahwa pekerjaan mereka akan diperiksa oleh supervisor/ manajer/pimpinan

dibandingkan dengan seseorang yang memiliki akuntabilitas rendah. Dalam standar umum dikatakan auditor independen harus melaksanakan tugasnya dengan cermat dan seksama. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut tanggungjawab yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya itu. Akuntabilitas (tanggungjawab) yang harus dimiliki auditor, yaitu tanggungjawab kepada klien dan tanggungjawab kepada seprofesi.

4. Hipotesis

Dari uraian masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah kompetensi, independensi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah baik secara parsial dan simultan.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam ini adalah kompetensi, independensi, dan akuntabilitas dan pengaruhnya terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Pohuwato

2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS Inspektorat

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 33 orang terdiri dari 10 orang di bagian auditor, 17 orang fungsional dan 6 orang P2UPD. Alasannya pemilihan populasi tersebut karena perannya sebagai aparat pengawasan intern pemerintah di Kabupaten Pohuwato. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau sensus dimana semua jumlah populasi dijadikan sampel.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen, serta keterkaitan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk memeriksa apakah isi kuesioner sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur dan cukup dipahami oleh semua responden yang diindikasikan oleh kecilnya persentase jawaban responden yang tidak terlalu menyimpang dari jawaban responden lainnya (Ghozali, 2012:140).

Sugiyono (2010:178) menyatakan bahwa validitas dapat dilakukan dengan mengkorelasikan antar item skor instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan antar skor faktor dengan skor total. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* dengan koefisien korelasi $\geq 0,3$, maka butir instrumen dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui reliabilitas pengukuran konstruk dalam penelitian ini dengan melihat nilai *cronbach alpha*. Pengukuran konstruk dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* nya lebih dari 0,60. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik formula *cronbach alpha*.

Berdasarkan uji reliabilitas (tabel 1) menunjukkan bahwa semua nilai *Cronbach Alpha* memiliki nilai di atas 0,60 sehingga setiap item pertanyaan yang digunakan dalam mengukur konstruk sudah reliabel.

3. Uji Koefisien Determinasi

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan *software IBM SPSS20*. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *R Square* adalah 0.657 atau 65,7%. Hal ini berarti bahwa variabel independen yaitu Kompetensi, Independensi, Akuntabilitas, mampu menjelaskan variabel dependen yaitu Kualitas

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

Audit 65,7% dan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4. Uji t

Uji Parsial untuk uji t ini digunakan untuk menguji signifikansi secara Parsial antara Variabel Bebas dan Variabel terikat sebagai berikut :

Variabel kompetensi (X1) dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato dimana t_{hitung} sebesar $0,598 > sig. 0,14$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dilakukan penulis signifikan. Artinya hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato yang besarnya 59,80% adalah wajar.

Variabel Independensi (X2) dengan Kualitas Audit secara parsial sebesar t_{hitung} yaitu $0,139 \geq 0,10$ berarti H_0 ditolak dan H_a diterima berarti signifikan. Artinya hubungan antara Independensi dengan Kualitas Audit yang besarnya 13,90% adalah wajar.

Sedangkan variabel akuntabilitas (x3) dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato dimana t_{hitung} sebesar $0,261 > sig. 0,06$ artinya H_0 ditolak dan H_a

diterima. Dengan demikian, maka hasil penelitian yang dilakukan penulis signifikan. Artinya hubungan antara akuntabilitas dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato yang besarnya 26,10% adalah wajar.

5. Uji F

Uji F secara simultan yang meliputi kompetensi, independensi dan akuntabilitas dengan kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah Kabupaten Pohuwato dimana $\alpha = 0,05$ dan $df n - 2$ atau $26 - 2 = 24$ diperoleh f_{hitung} sebesar $0,367 > sig. 0,029$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi kontribusi kompetensi, independensi dan akuntabilitas terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan Kabupaten Pohuwato yang sebesar 0,367 atau 36,70%.

Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa kompetensi, independensi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit dalam pengawasan keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan.

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. *October 2009 Research Days*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Alim M.N, T.Hapsari, dan L. Purwanti.2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika auditor sebagai Variabel Moderasi.Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- BPK.Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta: Deputi IV BPKP.
- Elfarini, E.C. 2005. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Skripsi. Universitas Negeri Semarang
- Falah, S. 2005. Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika Terhadap Sensitivitas etika.Tesis.Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (Edisi Kelima).Universitas Diponegoro Semarang.
- Haryanto, Sahmuddin, dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Karnia dwi Nolanda. 2015. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Motivasi, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Skripsi.Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi

Accountia Journal

(Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal)

Vol.3, No.2, October 2019, pp. 483 – 494

ISSN 2620-5335 (Online), ISSN 2622-8270 (Print)

Journal homepage: <http://jurnal.stiemtanjungredeb.ac.id/index.php/accountia>

- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1
- Mardisar, D. dan R. N. Sari. 2007. Pengaruh Akuntabilitas dan Pengetahuan pada Kualitas Hasil Kerja Auditor. Simposium Nasional Akuntansi X Makassar.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER / 05 / M.PAN / 03 / 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- Saifuddin. 2004. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi eksperimen pada Auditor dan Mahasiswa). Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang
- Sunarsip. 2010. Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Givernance. Media Akuntansi, No, 17/Th. VII. pp. II-VII
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol.5 No.1 April 2005.
- Taufiq Efendy Muh. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro semarang.
- Widayat, dkk. 2002. Riset Bisnis Penerbit Graha Ilmu. Malang.
- Widagdo, R, S. Lesmana, dan S.A. Irwandi. 2002. Analisis Pengaruh Atribut-atribut Kualitas Audit Terhadap Kepuasan Klien (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). SNA 5 Semarang. p. 560-574.